

Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN

Nasruddin¹, Nor Afa Azizah^{2*}

^{1), 2)} Program Studi Geografi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia.

*Email Koresponden: 2010416220020@mhs.ulm.ac.id

Diterima 2022-02-22 / Revisi 2022-02-24 / Diterbitkan 2022-06-30
Program Studi Geografi, Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak: Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur mutu (derajat perkembangan manusia) berdasarkan hasil pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia atau pertama kali diperkenalkan oleh United Nation Development Programme pada tahun 1990. Berdasarkan penelitian mengenai analisis Indeks Pembangunan Manusia di Negara ASEAN pada tahun 2020 dengan kriteria sangat tinggi Indeks Pembangunan Manusia ≥ 80 dimiliki oleh Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Disusul dengan Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang masuk kriteria tinggi Indeks Pembangunan Manusia 70 – 79. Kondisi kriteria sedang Indeks Pembangunan Manusia 61 – 69 hanya dimiliki oleh Laos. Sedangkan dengan kriteria rendah Indeks Pembangunan Manusia ≤ 60 dimiliki oleh Kamboja. Memadukan kualitas sumber daya manusia penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia karena akan mempermudah suatu negara untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia sehingga dapat mengurangi ketidakseimbangan antar negara di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan, Manusia, Asia Tenggara

Abstract: *The Human Development Index is an indicator to measure the quality (degree of human development) based on the results of economic development. The Human Development Index or was first introduced by the United Nation Development Program in 1990. Based on research on the analysis of the Human Development Index in ASEAN Countries in 2020 with a very high criterion of Human Development Index 80 owned by Malaysia, Brunei Darussalam and Singapore. This is followed by Indonesia, the Philippines, Thailand and Vietnam, which have high criteria for the Human Development Index of 70 – 79. The condition of the medium criteria for the Human Development Index of 61 – 69 is only owned by Laos. Meanwhile, Cambodia has a low Human Development Index 60 criteria. Integrating the quality of human resources is important to know the factors that affect the value of the Human Development Index because it will make it easier for a country to increase the value of the Human Development Index so as to reduce imbalances between countries in the Southeast Asian region.*

Keywords: *Development Index, People, Southeast Asia*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan dan dasar terwujudnya sebuah pemerintahan pada masing-masing negara adalah berlandaskan tujuan, yaitu meningkatkan mutu, derajat dan kemakmuran masyarakatnya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk memenuhi target tersebut dengan menyelenggarakan kebijakan, seperti program atau kegiatan lewat proses pembangunan. Faktanya, salah satu indeks keberhasilan proses pembangunan serta implementasi tugas dan fungsi pemerintahan di berbagai negara adalah meningkatnya kemakmuran masyarakat dan menurunnya tingkat kemiskinan. Para ahli berpendapat bahwa pembangunan pada hakikatnya merupakan interaksi yang diharapkan dapat mengubah konstruksi masyarakat serta memutus lingkaran kemiskinan yang tak berujung, seperti yang digambarkan oleh Handalani (2019) dan Freire (2013) dalam Mizal (2021). Rini & Sugiharti (2016) menekankan bahwa pembangunan bertujuan untuk memperluas aksesibilitas, menumbuhkan peruntukan kebutuhan hidup yang mendasar, meningkatkan taraf kehidupan dan mengembangkan pilihan finansial dan sosial.

Kebijakan pembangunan dalam pengaplikasiannya secara teratur ditujukan pada upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan angka Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang secara kualitatif mengilustrasikan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, secara lebih komprehensif sesuai dengan pengembangan gagasan *United Nation Development Programme* (UNDP) menetapkan indeks campuran untuk mengukur proses pembangunan manusia yang secara garis besar dibentuk oleh angka

harapan hidup pada saat kelahiran (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk pada usia dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau juga biasa disebut dengan *Human Development Index* (HDI) adalah salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat mutu fisik dan non fisik masyarakat. Mutu fisik terlihat berdasarkan angka harapan hidup, sedangkan mutu non fisik melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf. Bagian utama dalam melihat indikator kemakmuran masyarakat, adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau HDI menjadi sarana penting yang dipergunakan untuk pengaplikasian secara global terutama yang berhubungan langsung dengan pendidikan dan kualitas manusia (Ma'rif *et al*, 2020). Selain itu, melalui IPM dapat memberikan gambaran untuk melihat pencapaian pemerintah yang sedang berkuasa khususnya dalam bagian pembangunan manusia. Hansun & Kristanda (2019) mengemukakan bahwa PBB melalui institusinya telah memperkenalkan program pembangunan pada tahun 1990 dengan cara memadukan tiga dimensi dasar bagi pengembangan manusia, yaitu meniti umur panjang dan hidup sehat, mendapatkan pengetahuan serta mencapai standar hidup yang layak.

Pembangunan manusia merupakan perihal seseorang dan kelompok yang memperluas keputusan mereka untuk hidup layak, mampu memiliki kesehatan yang baik dan kesempatan yang bermartabat (UNDP, 2014). Hal ini berarti bahwa membangun suatu lingkungan dimana seseorang dapat mengembangkan kapasitas dirinya dan memberikan sarana kepada

masyarakat untuk meningkatkan kompetensi dalam ilmu pengetahuan serta kemakmuran masyarakat untuk mengakses bidang sumber daya, kesehatan dan lainnya. Tanpa ini, seseorang tidak dapat menemukan dirinya sendiri dalam menggapai peluang yang ada dan banyak pilihan yang ada disekelilingnya sehingga menyebabkan berada dalam kehidupan yang terbatas. Pembangunan manusia melibatkan peningkatan kapasitas dasar masyarakat yang akan memperkaya peluang agar dapat berperan serta dalam proses pembangunan. Todaro, (2003) dalam Danti (2011) mengemukakan bahwa kapasitas dasar terbagi menjadi tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan, antara lain kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self-esteem*) dan kebebasan (*freedom*).

Asia Tenggara adalah salah satu kawasan Asia yang mencakup 10 negara yang berkontribusi dalam menciptakan pembangunan manusia. Pada tahun 2007 diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Filipina, yaitu negara-negara Asia Tenggara menegaskan untuk mempercepat pembentukan suatu Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Pada waktu yang sama pula Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-13 di Singapura telah menyetujui untuk mendorong ASCC Blueprint untuk menjamin bahwa kegiatan substansial diambil untuk memajukan fondasi Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Salah satu rencana penting dalam upaya koordinasi ini adalah merumuskan kebijakan pembangunan manusia.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan organisasi kawasan yang berdiri sejak tahun 1967 dan menghimpun kerja sama antar negara-negara di Asia Tenggara. Anggota ASEAN terdapat 10 negara, antara lain Indonesia,

Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam. Organisasi kawasan ini didirikan berdasarkan keinginan yang sama, yaitu menciptakan kawasan yang damai. Negara-negara ASEAN telah menandatangani Deklarasi Bangkok yang menyerukan kerja sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi regional, pembangunan sosial budaya, perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta penghidupan masyarakat dengan memfasilitasi akses yang adil terhadap kesempatan pembangunan manusia, yaitu memperkenalkan dan investasi dalam bidang pendidikan, pelatihan SDM dalam pembangunan potensi, mendorong inovasi kewirausahaan, mempromosikan pemakaian bahasa Inggris, informasi teknologi serta ilmu terapan dalam kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah hal mutlak yang harus dipenuhi untuk mencetak sumber daya manusia yang akseptabel dalam pelaksanaan pembangunan. Adanya sumber daya manusia yang layak dan sesuai, secara otomatis akan membuat pelaksanaan pembangunan semakin lancar di berbagai bidang. Strategi pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia sangat diperlukan dan hendaknya lebih memandang manusia sebagai subjek dan objek pembangunan, sehingga pembangunan manusia dapat mewujudkan kemakmuran bagi manusia yang berada di wilayah pemerintahan tersebut. Selain itu, pembangunan manusia juga merupakan hal yang penting terutama bagi sebagian negara khususnya negara berkembang karena

banyak negara yang memiliki tingkat pembangunan yang tinggi tetapi lalai dalam menangani permasalahan ketimpangan sosial dan kemiskinan yang semakin luas.

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan bahwa dalam pembangunan manusia terdapat unsur-unsur penting yang dapat menjadi fokus utama, antara lain:

- a) Pembangunan perlu memprioritaskan penduduk sebagai pusat keunggulan.
- b) Pembangunan direncanakan untuk memperkaya keinginan bagi penduduk karena bukan sekedar untuk meningkatkan penghasilan.
- c) Pembangunan manusia berupaya untuk meningkatkan dan memanfaatkan potensi manusia secara optimal.
- d) Pembangunan manusia didukung oleh empat dasar pokok, yaitu: (1) Daya produksi, yaitu penduduk harus meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses memperoleh penghasilan; (2) Kesetaraan, yaitu penduduk harus memiliki akses untuk memperoleh kesempatan yang adil; (3) Kontinuitas, yaitu penduduk harus dipastikan memiliki akses untuk memperoleh kesempatan juga di generasi mendatang; (4) Pemberdayaan, yaitu masyarakat harus berperan secara penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang berpengaruh pada kehidupan mereka; (5) Pembangunan manusia melahirkan dasar dalam menentukan tujuan pembangunan dan menganalisis pilihan-pilihan untuk mewujudkannya.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI)

merupakan indikator untuk mengukur mutu (derajat perkembangan manusia) berdasarkan hasil pembangunan ekonomi. IPM atau HDI pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan negara maju, negara berkembang atau negara terkebelakang serta mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Adapun tujuan dari perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

- a) Membentuk indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b) Menggunakan beberapa indikator agar dapat menjaga ukuran tersebut.
- c) Membangun satu indeks campuran daripada sejumlah indeks dasar.
- d) Menciptakan suatu ukuran yang melibatkan aspek sosial dan ekonomi.

Indikator komposit pembangunan manusia merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengetahui nilai pembangunan manusia antar negara atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Rumus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{(Indeks X_1 + Indeks X_2 + Indeks X_3)}$$

Keterangan:

- X_1 : Indeks Harapan Hidup
 X_2 : Indeks Pendidikan
 X_3 : Indeks Standar Hidup Layak

Skor IPM terletak pada kisaran antara 0 hingga 1. Apabila skor IPM mendekati angka 1 maka akan semakin tinggi pula nilai IPM dan kualitas sumber daya manusia di negara atau wilayah tersebut. Kriteria Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut *United Nations Development Program* disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	Kriteria	Nilai IPM (%)
1.	Sangat Tinggi	≥ 80
2.	Tinggi	70 – 79
3.	Sedang	61 – 69
4.	Rendah	≤ 60

Sumber: *United Nations Development Program (UNDP), 2020*

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode studi literatur. Metode studi literatur adalah metode penelitian yang berhubungan dengan metode akumulasi data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah suatu bahan penelitian (Nainggolan, 2020). Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN pada tahun 2018 hingga 2020. Data tersebut diperoleh dari Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*), *United Nations Development Program (UNDP)* dan artikel terkait dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi literatur ini yaitu mencari data yang berhubungan dengan variabel atau hal-hal yang berupa buku, catatan, makalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Myanmar, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja serta Vietnam karena memiliki bentuk kerja sama yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun sehingga terdapat banyak kesamaan. Selain itu, negara ASEAN memiliki tingkat pencapaian IPM yang cenderung stabil dan karakteristik kependudukan yang hampir sama.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Data yang diperoleh dari sumber tertentu diolah serta dianalisis. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis isi (*content analysis*) melalui analisa geospasial. Data-data yang diperoleh diolah secara spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis melalui aplikasi ArcGIS 10.4. Asmoro *et al* (2021) mendefinisikan Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan alat yang ampuh serta canggih untuk menampilkan dan menganalisis hubungan spasial antara fenomena geografis dalam bentuk vektor dan gambar.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada kurun waktu tiga tahun, yaitu dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* pada kurun waktu 2018-2020 menunjukkan *trend* yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN pada tahun 2018-2020 terdapat beberapa negara yang memiliki nilai IPM meningkat dan stabil seperti Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Vietnam dan Kamboja. Namun ada pula negara yang mengalami fluktuasi naik dan turun seperti Brunei Darussalam. Nilai IPM tertinggi dimiliki oleh Singapura sebesar 93,8%, sedangkan nilai IPM terendah dimiliki oleh Kamboja, yaitu 59,4%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel 2 berikut.

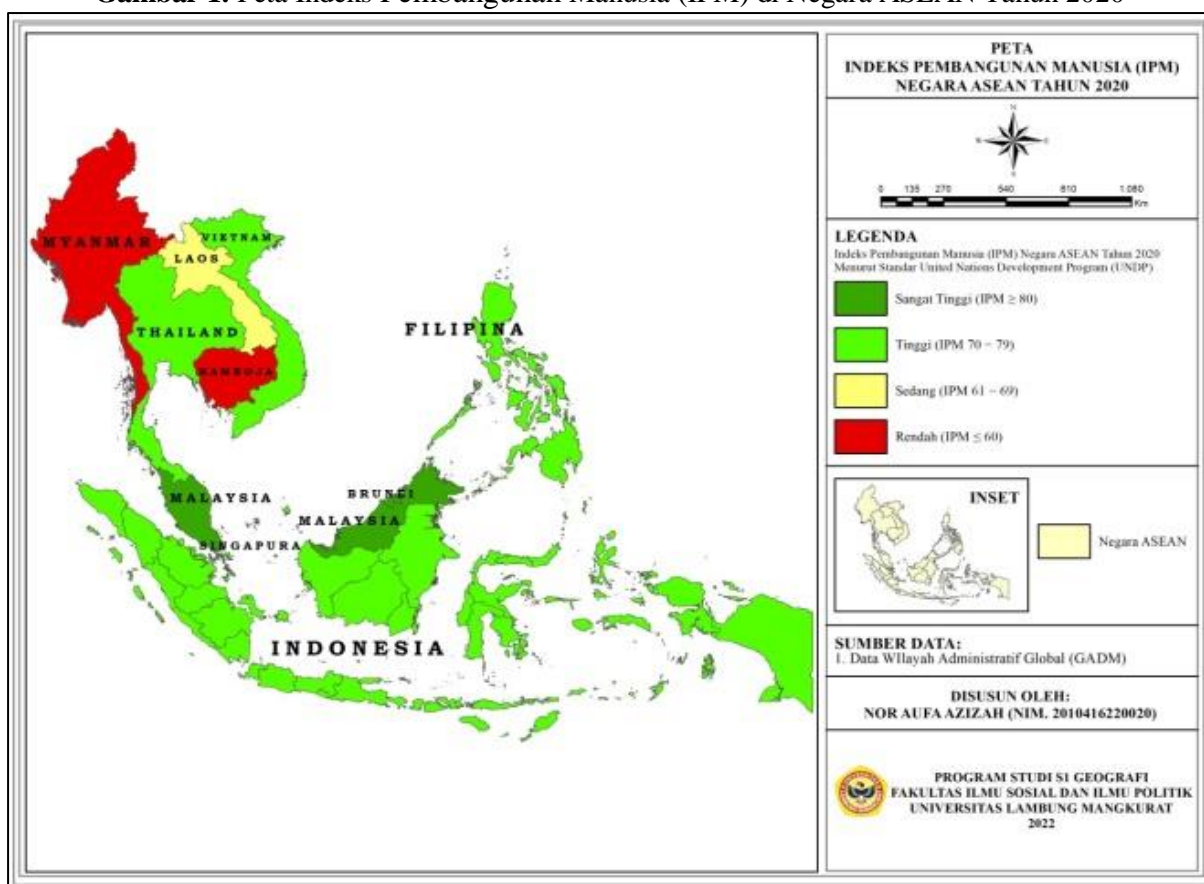
Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN Tahun 2018-2020

Negara	Nilai IPM (%)			Kriteria
	2018	2019	2020	
Indonesia	70,7	71,2	71,8	Tinggi
Malaysia	80,5	80,5	81	Sangat Tinggi
Myanmar	57,2	57,9	58,3	Rendah
Brunei Darussalam	83,8	83,6	83,8	Sangat Tinggi
Singapura	93,3	93,6	93,8	Sangat Tinggi
Filipina	70,8	71,1	71,8	Tinggi
Thailand	76,5	77,2	77,7	Tinggi
Laos	60,8	60,9	61,3	Sedang
Kamboja	58,2	58,5	59,4	Rendah
Vietnam	69,6	70	70,4	Tinggi

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2022

Ketidakseimbangan suatu pembangunan dan kemakmuran negara-negara di kawasan ASEAN harus ditiadakan, agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan IPM masyarakatnya. Terutama sejak berlangsungnya Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA), setiap negara di kawasan ASEAN agar dapat memadukan kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal awal suatu pembangunan (Azizah *et al*, 2021) Salah satu indikator untuk menentukan kualitas sumber daya manusia adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh sebab itu, untuk memadukan kualitas sumber daya manusia, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM karena akan mempermudah suatu negara untuk meningkatkan nilai IPM sehingga dapat mengurangi ketidakseimbangan antar negara di kawasan ASEAN. Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN tahun 2020 disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Peta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN Tahun 2020

Sumber: Olahan Data Primer

Peran dan posisi pemerintah dalam pembangunan suatu negara sangat penting dalam mengurangi ketimpangan ini. Memang, komponen pasar yang menjadi tulang punggung kaum industrialis, yang tidak memerlukan campur tangan negara, kini sudah tidak layak huni karena banyaknya keadaan darurat moneter yang terjadi. Aliran Keynesian telah mengantisipasi munculnya keadaan darurat moneter dengan anggapan bahwa pasar tidak dapat mengatasi masalah minat pasar. Aliran ini berpendapat bahwa suatu hari pasar akan menghadapi kecanggungan karena ketidakmampuan untuk menandingi pasar organik. Sejalan dengan itu, Keynes menggarisbawahi pentingnya tugas negara dalam menaklukkan ini (Sholekhah, 2018).

Keleluasan peran pemerintah dalam bidang ekonomi terlihat dari pedoman dan kebijakan fiskal yang dijalankan secara konsisten. Pedoman diharapkan dapat mengatur seluruh pelaku ekonomi, khususnya swasta agar selalu berada dalam kondisi ekonomi yang ideal. Selain itu, kebijakan fiskal yang diterapkan dalam bentuk anggaran pemerintah menjadi alat untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintah serta penataan produk publik yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat.

Pemerintah yang menentukan suatu kebijakan tertentu memiliki dampak biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini didanai oleh anggaran pemerintah yang menjadi pengeluaran pemerintah. Anggaran keuangan yang didistribusikan untuk suatu bidang memperlihatkan komitmen pemerintah yang memiliki kedudukan penting dalam mendorong kemakmuran masyarakat, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. Adanya perkembangan IPM negara di kawasan ASEAN membuat para peneliti mengkaji

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM di suatu negara. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Arisman (2018), penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM di Negara ASEAN. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk dan tingkat pendapatan perkapita mempunyai kekuasaan terhadap tinggi rendahnya IPM pada negara-negara ASEAN (Sholekhah, 2018).

ASEAN memiliki wilayah daratan dengan luas 4,46 juta km² atau setara dengan 3% total luas daratan di bumi dengan populasi yang mencapai angka 600 juta orang atau setara dengan 8,8% total populasi di dunia. Sumber daya manusia yang dapat mengelola sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien hanya yang memiliki kualitas dan keterampilan karena akan berperan aktif dalam proses produksi.

Negara ASEAN pada tahun 2020 dengan IPM kriteria sangat tinggi (IPM \geq 80) dimiliki oleh Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Disusul dengan Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang masuk kriteria tinggi (IPM 70 – 79). Kondisi kriteria sedang (IPM 61 – 69) hanya dimiliki oleh Laos. Sedangkan IPM dengan kriteria rendah (IPM \leq 60) dimiliki oleh Kamboja.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Asfahani (2021) yang berjudul “Analisis Disparitas Pembangunan Manusia Antar Negara di ASEAN” yang mengidentifikasi perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ASEAN tahun 2019 menjadi empat kriteria. Nilai IPM dengan kriteria sangat tinggi diraih oleh Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Kemudian untuk Indonesia, Filipina dan Thailand termasuk kriteria tinggi, hanya

Vietnam yang memiliki kriteria sedang. Sedangkan hanya Kamboja menempati kriteria rendah.

Berbeda dengan penelitian oleh Andini (2017) yang berjudul “Analisis Determinan Pembangunan Manusia di Beberapa Negara ASEAN” yang mengidentifikasi perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ASEAN tahun 2014 menjadi empat kriteria. Nilai IPM dengan kriteria sangat tinggi dimiliki oleh Brunei Darussalam dan Singapura saja. Kriteria tinggi hanya dimiliki oleh Malaysia dan Thailand, sedangkan Indonesia, Filipina dan Vietnam termasuk kriteria sedang. Disusul oleh kriteria rendah yang dimiliki oleh Myanmar, Laos dan Kamboja.

Kristiawan & Iskandar (2020) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) adalah bidang Teknologi dan Komunikasi Informasi (TIK) *Information Communication Technology* (ICT). Banyaknya teori dan fakta yang mengungkapkan efek besar bidang TIK terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Literatur yang berkembang luas tentang pentingnya TIK bagi pembangunan dan peningkatan efisiensi organisasi serta proses pengembangan manusia (Tyworth, 2013). TIK dianggap dapat membentuk ulang dunia seperti, mengefisieni waktu dan uang, melampaui ruang serta meningkatkan akses informasi dan pendidikan. Selain itu, pemerintahan merupakan komponen utama dalam pembangunan yang makmur di negara mana saja. Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan manusia yang lebih unggul, maka diperlukan *good governance* terutama di negara berkembang. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Ahmad & Saleem (2014) yang menjelaskan bahwa indikator *good governance* mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan manusia. Perbedaan nilai IPM di Negara ASEAN tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial dan ekonomi negara yang bervariasi. Kondisi tersebut dapat diilustrasikan melalui indikator-indikator pembangunan, baik indikator ekonomi ataupun sosial demografi.

1) Indonesia

Wisnumurti *et al* (2014) mengemukakan bahwa Indonesia sebagai negara yang sedang mengalami pergeseran kelompok populasi yang bermula didominasi oleh kelompok usia muda (anak-anak dan remaja) menjadi kelompok usia produktif, peristiwa ini dinamakan bonus demografi.

Menurunnya pertumbuhan penduduk di Indonesia disebabkan oleh keberhasilan upaya pemerintah, yaitu adanya Program Keluarga Berencana (KB) pada orde baru (1966-1998) akibatnya tingkat kelahiran di Indonesia semakin menurun.

Selain itu, beberapa Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berperan besar dalam perbaikan tingkat kesehatan (Dartanto, 2017). Selain itu, bidang pendidikan di Indonesia juga mengalami perbaikan dan telah mendukung peningkatan kualitas pendidikan, yaitu adanya penerapan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang sekarang ini terus ditingkatkan hingga ke perguruan tinggi dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Perbedaan terletak pada peruntukannya, Program BOS diterima oleh institusi pendidikan sedangkan Program PIP diterima oleh peserta didik yang termasuk golongan tidak mampu.

2) Malaysia

Malaysia mengalami perbaikan dari berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Perubahan struktur penduduk Malaysia telah berubah sejak berlakunya Program Keluarga Berencana (*Family Plannin*) pada tahun 1966, sehingga tingkat kelahiran di Malaysia mengalami penurunan (Peng, 2020). Situasi inilah yang mengakibatkan bonus demografi karena kelompok usia produktif tumbuh lebih cepat daripada kelompok usia non produktif. Selain itu, dibidang kesehatan Malaysia mengalami penurunan angka kematian ibu dan anak, sehingga angka harapan hidup semakin meningkat.

Meskipun tingkat pendidikan di negara Malaysia jauh diatas rata-rata jika dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN, Malaysia mempunyai problem di bidang pendidikan yaitu tidak cocoknya kemampuan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri di Malaysia, sertanya berbedanya sistem pendidikan masyarakat pribumi dan migran, hal ini memunculkan ketidakseragaman pola dan layanan pendidikan.

3) Myanmar

Myanmar mengalami penurunan tingkat kelahiran dalam aspek demografi yang menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk Myanmar semakin rendah, yaitu dibawah 1% yang disebabkan oleh meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi (Wai *et al*, 2020). Munculnya peningkatan penggunaan alat kontrasepsi merupakan dampak dari Program Keluarga Berencana yang mana wanita, khususnya masyarakat dengan pendapatan rendah diberi pelayanan kesehatan reproduktif tidak berbayar. Selain menurunkan tingkat kelahiran, Program

Keluarga Berencana juga memberdayakan wanita Myanmar untuk menggapai peluang menyelesaikan pendidikan atau mewujudkan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Myanmar telah meningkatkan dalam bidang sosial, yaitu akses air bersih dan sanitasi perbaikan gizi. Sedangkan dibidang pendidikan, Myanmar hanya mencapai Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan rata-rata pelajar tidak dapat menyelesaikan Sekolah Dasar (SD).

4) Brunei Darussalam

Ahmad (2018) mengemukakan bahwa secara demografi Brunei Darussalam mengalami penurunan tingkat kelahiran sehingga pertumbuhan populasi juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh pergeseran peran wanita dan meningkatnya status sosial ekonomi. Pemerintah Brunei Darussalam sampai saat ini belum pernah memberlakukan kebijakan dalam rangka kelahiran dengan alasan utama karena kecilnya wilayah. Dalam bidang kesehatan munculnya peningkatan angka harapan hidup, yaitu strategi kesehatan yang dituangkan dalam visi Nasional (Wawasan Brunei 2035). Sedangkan tingkat pendidikan terdapat stagnasi indeks pendidikan Brunei Darussalam karena ada perubahan sistem pendidikan oleh Kementerian Pendidikan Brunei, yaitu *System for The 21st Century* (SPN21) yang belum menunjukkan hasil.

5) Singapura

Singapura adalah negara yang mempunyai tingkat kesejahteraan tertinggi di ASEAN. Dalam bidang kesehatan, memiliki angka harapan hidup yang tinggi sesuai dengan pemerintah yang memfasilitasi pelayanan kesehatan yang baik. Tingkat kesadaran masyarakat Singapura

terkait bidang kesehatan sudah sangat baik karena berdasarkan survey *Prudential* dan *The Economist*, hasil menunjukkan bahwa 66% responden menjaga pola makan sehat dan 49% responden menjaga aktivitas fisik untuk mencegah penyakit. Sedangkan bidang pendidikan Singapura sudah sangat baik karena rata-rata masyarakat telah menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi sehingga menyebabkan perekonomian yang maju karena daya beli masyarakat yang tinggi.

6) Filipina

Tingkat kelahiran di Filipina mengalami penurunan yang pesat sehingga pertumbuhan populasinya mengalami penurunan yang signifikan. Saat ini Filipina mendekati *trend replacement-level fertility*, yaitu peristiwa populasi bayi yang lahir persis menggantikan generasi satu ke generasi berikutnya, rata-rata kelahiran untuk setiap wanita adalah 2,1 (Talabis *et al*, 2013).

7) Thailand

Thailand menurut aspek kependudukan mengalami penurunan pertumbuhan populasi karena program penurunan tingkat kelahiran yang telah diberlakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Program juga disertai dengan upaya penurunan tingkat kematian bayi dan peningkatan akses pendidikan yang lebih baik.

8) Laos

Laos merupakan salah satu negara yang mengalami peningkatan tingkat kelahiran yang diakibatkan oleh peningkatan kehamilan remaja yang direncanakan. Beberapa permasalahan yang menghambat perbaikan di bidang kesehatan Laos, yaitu kasus stunting yang sangat tinggi, terbatasnya

pengetahuan gizi dan rendahnya anggaran kesehatan sehingga mengakibatkan kurangnya fasilitas kesehatan. Selain itu, bidang pendidikan Laos juga bermasalah karena kurangnya fasilitas infrastruktur atau guru yang berkualifikasi.

9) Kamboja

Kamboja mempunyai angka harapan hidup lebih rendah dibandingkan Negara ASEAN lainnya. Namun, ada terjadi perbaikan di bidang kesehatan, yaitu besarnya penurunan tingkat kematian bayi. Sedangkan pendidikan di Kamboja termasuk masalah penting yang mengakibatkan rendahnya kualitas SDM.

10) Vietnam

Vietnam mengalami penurunan pertumbuhan populasi, hal ini dikarenakan oleh Program Keluarga Berencana yang menetapkan masyarakat untuk mempunyai satu/dua anak saja. Pada dasarnya perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan Vietnam tidak mengalami peningkatan, karena rata-rata pelajar Vietnam hanya sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Negara ASEAN pada tahun 2020 dengan IPM kriteria sangat tinggi ($IPM \geq 80$) dimiliki oleh Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Disusul dengan Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam yang masuk kriteria tinggi ($IPM 70 - 79$). Kondisi kriteria sedang ($IPM 61 - 69$) hanya dimiliki oleh Laos. Sedangkan IPM dengan kriteria rendah ($IPM \leq 60$) dimiliki oleh Kamboja. Memadukan kualitas sumber daya manusia penting untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai IPM karena akan mempermudah suatu negara untuk meningkatkan nilai IPM sehingga dapat mengurangi ketidakseimbangan antar negara di kawasan ASEAN

REFERENSI

- Ahmad, Z., & Saleem, A. (2014). Impact of Governance on Human Development. *Pakistan Journal of Women's Studies: Alam-e-Niswan*, 8(3), 612–628.
- Ahmad, N. (2018). Attitudes Towards Family Formation Among Young Adults in Brunei Darussalam. *Pakistan Journal of Women's Studies: Alam-e-Niswan*, 25(1), 15–34.
- Andini, A. (2017). *Analisis Determinan Pembangunan Manusia di Beberapa Negara ASEAN Periode 2002-2015*.
- Arisman, A. (2018). Determinant of Human Development Index in ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(1), 113–122.
- Aufa Azizah, N., Kumalawati, R., Normelani, E., & Bachri, A. A. (2021). Analisis Ekonomi Wilayah dan Evaluasi Dampak Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2).
- Asfahani, F. R. (2021). *Analisis Disparitas Pembangunan Manusia Antar Negara di ASEAN*. 84–120.
- Asmoro, A. Y., Yusrizal, F., & Saputra, I. (2021). Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Sekapuk: Sebuah Participatory Action Research. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 30–47.
- Azizah, N. A., Riadi, S., & Nugroho, A. R. (2021). Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. *Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(1), 21–34.
- Danti, C. U. (2011). *Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2007-2009*. 8.
- Dartanto, T. (2017). *Universal Health Coverage in Indonesia: Informality, Fiscal Risks and Fiscal Space for Financing UHC*.
- Freire, P. (2013). *Pedagogy of the Opressed*. (30th Anniv). Group Inc.
- Handalani, R. T. (2019). Determinan Deforestasi Negara-Negara Di Kawasan Asia Tenggara Periode 2008-2015. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(1), 1–19. <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i1.21267>
- Hansun, S., & Kristanda, M. B. (2019). Human Development Index Forecasting Using Exponentially Weighted Moving Average. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 8(6), 1509–1514. <https://doi.org/10.35940/ijeat.F8142.088619>
- Kristiawan, A. S., & Iskandar, D. D. (2020). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, ICT Development Index dan Good Governance Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Anggota ASEAN dan SAARC Kategori Lower-Upper Medium. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 140–156.
- Ma'rif, E. F., Mahmudah, M., Ma'ni, R., Wahidiah, W., & Ibrahim, M. (2020). Analisis Percepatan Peningkatan IPM Menggunakan Metode Holt: Studi Kasus Negara ASEAN. *Jurnal Kajian Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 19–26.

- Mizal, B. (2021). Pendidikan Pembebasan (Memahami Pemikiran Paulo Friere dari Perspektif Islam). *Jurnal Intelektualia*, 7(01), 1–22.
- Nainggolan, E. J. (2020). *Literature Review: Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga dengan Upaya Pencegahan Penularan Tuberculosis Paru*.
- Peng, T. N. (2020). *Bracing for Low Fertility in Malaysia*. 28, 1–11.
- Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 01(2), 88–104.
- Sholekhah, U. (2018). *Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 6 Negara ASEAN)*.
- Talabis, D. A. S., Manay, E. J. V., Babierra, A. L., Flores, J. J. M., & Rabajante, J. F. (2013). A Numerical Model of Philippine Population Growth: Child Policy, Quantitative Insights and Challenges. *Journal of Social Sciences*, 6, 45–71.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (7th ed.). Erlangga.
- Tyworth, M. (2013). Organizational Identity and Information Systems: How Organizational ICT Reflect Who an Organization is. *Journal of Information Systems*, 23(1), 69–83. <https://doi.org/10.1057/ejis.2013.32>
- Ulfah, R. (2021). Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan Melalui Pembelajaran Geografi di MAN Insan Cendekia Tanah Laut. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, 2(2), 91-100.
- UNDP. (2014). *Advancing Human Development Through the ASEAN Community*. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hailand_nhdr_2014_0.pdf
- Wai, M. M., Bjertness, E., Htay, T. T., Liabsuetrakul, T., Myint, A. N. M., Stigum, H., & Sundby, J. (2020). Dynamics of Contraceptive Use Among Married Women in North and South Yangon, Myanmar: Findings from a Cross-Sectional Household Survey. *Journal Contraception: X*, 2, 100015. <https://doi.org/10.1016/j.conx.2019.100015>
- Wisnumurti, A. A. G. O., Darma, I. K., & Suasih, N. N. R. (2014). Government Policy of Indonesia to Managing Demographic Bonus and Creating Indonesia Gold in 2045. *Journal of Commerce and Social Sciences (PJCSS)*, 8(3), 612–628.